



KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA
PONTIANAK

NOMOR 13/DISPERPUSIP/TAHUN 2025

TENTANG

PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PONTIANAK

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan salah satu upaya untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan ekonomis adalah dengan memperbaiki proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan maka perlu menyusun Standar Operasional Procedur Administrasi Pemerintahan;
- b. bahwa untuk penyusunan Standar Operasional Procedur Administrasi Pemerintahan dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9,) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembar Negara Tahun 2005 Nomor 4585);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 8. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 05 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak terdiri dari sebagai berikut:
- a. Standar Operasional Prosedur Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak;
 - b. Standar Operasional Prosedur Bidang Perpustakaan;
 - c. Standar Operasional Prosedur Bidang Kearsipan
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 13 Januari 2025



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KOTA PONTIANAK
NOMOR 13 DISPERPUSIP/TAHUN 2025
TENTANG PENYUSUNAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PONTIANAK

No	Bidang/Urusan	Nama Standar Operasional Prosedur	
1	Kesekretariatan		
	a. Umum dan	1.	Pelayanan Pengusulan Kenaikan Pangkat Pilihan
	Aparatur	2.	Penanganan Rumah Tangga Kantor
		3.	Penyimpanan Barang
		4.	Pengurusan Barang
		5.	Pengamanan Kantor
		6.	Pelayanan Usulan Uang Duka
		7.	Pengajuan Usulan Laporan Pajak Penghasilan Pribadi
		8.	Usulan Mutasi Masuk ke lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
		9.	Pelayanan Tamu
		10.	Pelayanan Izin Penelitian Mahasiswa
		11.	Penerbitan SK Kepala Perangkat Daerah
		12.	Pembinaan Aparatur Sipil Negara
		13.	Pelayanan Usulan Ujian Penyesuaian Ijazah
		14.	Pelayanan Usulan Mutasi Keluar dari Pemerintah Kota Pontianak
		15.	Pengusulan Kenaikan Pangkat Reguler
		16.	Persiapan Pelaksanaan Rapat
		17.	Pengagendaan Surat
		18.	Pembuatan Surat Edaran
		19.	Rekapitulasi Kehadiran Kerja Pegawai
		20.	Pelayanan Usulan Kartu Istri, Kartu Suami, Kartu Pegawai/Kartu Pegawai Elektronik
		21.	Pengusulan Ujian Dinas
		22.	Pelayanan Pengusulan TASPEN
		23.	Pengusulan Perubahan Status Calon Pegawai menjadi Pegawai
		24.	Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan
		25.	Pembuatan SPT dan SPPD
		26.	Pengusulan Penjatuhan Hukuman Disiplin Aparatur
		27.	Penjatuhan Hukuman Disiplin Aparatur
		28.	Pengusulan Penghargaan Satya Lencana/Aparatur teladan
		29.	Pengumpulan Sasaran Kerja Pegawai
		30.	Pengusulan Pensiun
		31.	Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala
		32.	Penangan Surat Keluar
		33.	Penanganan Surat Masuk
		34.	Penyusunan Formasi dan Bezzeting
		35.	Pelayanan Usulan Izin Perceraian
		36.	Pengusulan Pendidikan dan Latihan
		37.	Pelayanan Usulan Izin Belajar dan Tugas Belajar
		38.	Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Tugas
		39.	Pelayanan Penerbitan Surat izin Cuti Pegawai
		40.	Penyusunan Analisa Jabatan dan Analis Beban Kerja

		41	Penanganan Pengaduan Masyarakat
		42	Pelayanan Survey Indek Kepuasan Masyarakat menggunakan Surveyor
		43	Pelayanan Survey Indek Kepuasan Masyarakat secara Mandiri
		44	Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat
		45	Penyusunan Standar Operasional Prosedur
	b. Perencanaan	47.	Penyusunan Rencana Strategis
	dan Keuangan	48.	Peta Proses Bisnis
		49.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (evaluasi rencana kerja)
		50.	Pengisian Laporan LPPD
		51.	E-Sakip
		52.	Rencana Aksi
		53.	Penyusunan Rencana Kerja
		54.	Penyusunan PROFIL
		55.	Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan
		56.	Pohon Kinerja
		57.	Casecading
		58.	Perjanjian Kinerja
		59.	Penyusunan LAKIP dan TAPKIN
		60.	Penyusunan LKPJ
		61	Penyusunan LHP
		62	Pembayaran Gaji
		63	Penyusunan RKA SKPD
		64	Penyusunan Anggaran Kas (murni & ABT)
		65	Penerbitan SPM
		66	Penerbitan SPP-LS
		67	Register Penutupan Kas
		68	SPJ Administratif
		69	Pencairan Dana
		70	Penjurnalan
		71	Penyusunan Buku Besar
		72	Penyusunan Neraca Saldo
		73	Penyusunan Kertas Kerja (Worksheet)
		74	Penyusunan LRA
		75	Penyusunan Neraca
		76	Penyusunan Prognosis
		77	Penyusunan CALK
		78	Penyusunan BKU
		79	Penyusunan Buku Kas Tunai
		80	Penyusunan Buku Simpanan Bank
		81	Penyusunan Buku Pajak
		82	Penyusunan Buku Panjar
		83	Rekapitulasi ROB
		84	SPJ Fungsional
		85	Pengesahan Laporan SPJ
		86	Verifikasi SPJ

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
 DAN KEARSIPAN KOTA PONTIANAK
 NOMOR 13/DISPERPUSIP/TAHUN 2025
 TENTANG
 PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL
 PROSEDUR (SOP) PADA DINAS PERPUSTAKAAN
 DAN KEARSIPAN KOTA PONTIANAK

No	Bidang/Urusan	Nama SOP	
2.	Bidang Perpustakaan	1.	Pengadaan Bahan Pustaka Secara Mandiri
		2.	Pengadaan Bahan Pustaka Melalui Hadiah
		3.	Pengolahan Bahan Pustaka
		4.	Pengolahan Majalah dan Koran
		5.	Pengolahan Data Base Bahan Pustaka
		6.	Pemeliharaan Buku
		7.	Pemeliharaan Audio Visual
		8.	Pengolahan Audio Visual
		9.	Layanan Perpustakaan Umum
		10.	Layanan Operasional Mobil Pintar
		11.	Layanan Operasional Mobil Perpustakaan Keliling
		12.	Layanan Rumah Baca Kecamatan Pontianak Barat
		13.	Layanan Rumah Baca Kecamatan Pontianak Timur
		14.	Layanan Rumah Baca Taman Akcaya
		15.	Layanan Rumah Baca Digulis
		16.	Layanan Rumah Baca Taman Alun Kapuas
		17.	Layanan Perpustakaan Digital
		18.	Layanan Ruang Baca Umum
		19.	Layanan Sirkulasi
		20.	Layanan Pembuatan Kartu Tanda Anggota Perpustakaan
		21.	Layanan Peminjaman Buku
		22.	Layanan Pengembalian dan atau Perpanjangan Buku
		23.	Layanan Peminjaman Koleksi Tandon untuk dibaca ditempat
		24.	Layanan Peminjaman Koleksi Referensi untuk dibaca ditempat
		25.	Layanan Surat Kabar/ Koran
		26.	Layanan Fasilitas Internet
		27.	Penagihan Buku
		28.	Penggantian Buku Hilang
		29.	Layanan Pengaduan Masyarakat
		30.	Stock Opname Bahan Pustaka
		31.	Layanan Peminjaman Multimedia

No	Bidang / Urusan	Nama Standar Oprasional Prosedur	
		32.	Lomba Bercerita
		33.	Pameran dan Bazar Buku
		34.	Bedah Buku / Seminar
		35.	Pameran Pelayanan Publik Perpustakaan
		36.	Pembentukan SK TIM
		37.	Workshop Petugas Perpustakaan
		38.	Lomba Perpustakaan Sekolah
		39.	Lomba Perpustakaan Kelurahan
		40.	Peningkatan Kualitas Perpustakaan
		41.	Pembentukan SK TIM
		42.	BOBO+F
		43.	Berkemas
		44.	Anakku Disapa
		45.	Layanan Konpers
		46.	Perpuskite
		47.	Pesantuhpo
		48.	APBB-DPA
		49.	Layanan Daftar Anggota Member
			Perpuskite BOBO+

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KOTA PONTIANAK
NOMOR 13/DISPERPUSIP/TAHUN 2025
TENTANG
PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) PADA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KOTA PONTIANAK

No	Bidang/Urusan		
3.	Bidang Kearsipan	1.	Pemusnahan Arsip
		2.	Pemeliharaan Arsip
		4.	Pelayanan Masyarakat Umum/Mahasiswa
		5.	Pelayanan SKPD
		6.	Pembinaan Kearsipan
		7.	Penyerahan Arsip
		8.	Izin Penggunaan Arsip
		9.	Izin dan Layanan Arsip Statis
		10.	Izin Peminjaman Arsip In Aktif
		11.	Pembinaan Kearsipan
		12.	Autentifikasi Arsip Statis dan Hasil Alih Media
		13.	Alih Media Arsip
		14.	Pengawasan Kearsipan
		15.	Alih Media

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KOTA PONTIANAK,



RENDRAYANI